

ABSTRAK

Korea Selatan dan Korea Utara dipisahkan oleh Demilitarized Zone atau DMZ yang dibentuk sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953 untuk mengakhiri Perang Korea. Adanya DMZ sebagai *buffer zone* tidak lantas meredakan ketegangan di Semenanjung Korea. Salah satu penyebabnya adalah siaran propaganda yang dilakukan dengan pengeras suara di DMZ. Siaran propaganda telah dimulai sejak tahun 1953 dan sempat berhenti pada tahun 2004 atas kesepakatan Korea Selatan dan Korea Utara. Namun pada tahun 2015, Seoul memulai kembali siaran propaganda dan semakin intensif pada awal tahun 2016. Langkah ini disinyalir sebagai respon atas uji coba bom hidrogen yang dilakukan oleh Pyongyang. Kendati demikian, peneliti mencoba memperdalam penelitian mengenai faktor lain yang menyebabkan Korea Selatan memilih untuk mengaktifkan kembali pengeras suara propaganda setelah terhenti selama sebelas tahun lamanya. Penelitian ini mengkorelasikan dimulainya siaran propaganda dengan pemikiran tentang dilema respon, mitigasi rezim internasional, dan tahap konflik yang telah mencapai fase eskalasi. Hingga akhirnya, peneliti menemukan fakta bahwa Korea Selatan mengalami dilema respon dalam menghadapi provokasi Korea Utara. Terlebih, tidak ada rezim keamanan yang menjadi mitigator konflik di Semenanjung Korea hingga ketegangan telah mencapai tahap eskalasi. Kondisi ini yang mendorong Seoul memulai kembali siaran propaganda, atau dikenal sebagai *Propa-Gangnam*, sebagai upaya strategisnya melawan rezim Kim Jong-un.

Kata Kunci: Semenanjung Korea, Konflik Nuklir, *Propa-Gangnam*, Mitigasi Rezim, Dilema Respon.